

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT



SEKRETARIS

DENGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NADIYAH, S.Si., M.I.L.

Jabatan

: SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

RUSDI HARTONO, S.Pi, MP

Jabatan :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2025

10

RUSDI HARTONO, S.Pi. MP NIP, 19720426 199703 1 005 NADIYAH. S.Si.. M.I.L. NIP. 19840113 200604 2 004

PIHAK PERTAMA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)	100 %
		Persentase Laporan Pertanggung- jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifkasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait	100 %
		Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas dan UPTD yang dapat dimanfaatkan/ dioperasionalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukkan/ masterplan yang telah ditetapkan	100 %
		Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
		Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	100 %
		Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor	100 %
		Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	100 %
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	100%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3 (Level)

Kegiatan		Anggaran
 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Rp	2.321.342.800
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	29.710.438.789
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 	Rp	171.271.400
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	1.527.489.700
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.642.487.300
 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Rp	952.210.000
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Rp	1.621.430.730
 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Rp	2.276.557.000
JUMLAH	Rp	40.223.227.719

PIHAK KEDUA,

RUSD HARTONO, S.Pi. MP NIP. 19720426 199703 1 005 Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

NADIYAH. &.Si., M.I.L. NIP. 19840113 200604 2 004



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

DENGAN

SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

ROSE MAULINA, SE., MMSI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: NADIYAH, S.Si., M.I.L.

Jabatan

SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA.

NIP. 19840113 200604 2 004

ROSE MAULINA. SE., MMSI

PIHAK PERTAMA.

NIP. 19760303 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
2	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
3	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	792,602.300
-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp	771.481.900
-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp	757.258.600
	JUMLAH	Rp	2.321.342.800

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

NIP. 19840113 200604 2 004

ROSE MAULINA. SE., MMSI NIP. 19760303 200903 2 001

PIHAK PERTAMA,



KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

DENGAN

SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SITI ASYURA., S.E., MM

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: NADIYAH., S.Si., M.I.L

Jabatan

SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19840113 200604 2 004

<u>SITI ASYURA., S.E., MM</u> NIP. 19710115 199303 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase SKPD dengan kategori tata kelola pemerintahan yang baik	100,00 %
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 orang/bulan
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase SKPD dengan kategori tata kelola pemerintahan yang baik	100,00%
	- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
3.	Meningkatnya pemanfaatan fasilitas layanan umum kantor untuk mendukung kinerja pegawai di SKPD	Persentase tingkat kepuasaan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	100,00%
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
4.	Meningkatnya kualitas pemenuhan layanan jasa kantor untuk mendukung kinerja pegawai SKPD	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan	100,00%
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	29.710.438.789,00
	 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 	Rp. Rp.	29.082.893.589,00 623.545.200,00
	- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	4.000.000,00
2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	171.271.400,00
	 Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 	Rp.	171.271.400,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.245.939.000,00
	- Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	78.560.000,00
	 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Rp.	1.167.379.000,00
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	272.009.230,00
	 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	Rp.	272.009.230,00
	JUMLAH	Rp.	31.127.649.189,00

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

<u>NADIYAH., S.Si., M.I.L</u> NIP. 19840113 200604 2 004 <u>SITI ASYURA., S.E., MM</u> NIP. 19710115 199303 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DENGAN SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DEDDY HARIYANTO

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: NADIYAH

Jabatan

: SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NIP. 198401132006042004

<u>DEDDY HARIYANTO</u> NIP. 197612262005011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 Paket
2	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
4	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	520 Orang
5	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	36 Orang
6	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
10	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket
11	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106 Unit
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit

15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	181 Unit

I. APBD TA. 2025

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1.1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	204.000.000
1.1.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	180.500.000
1.1.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	86.167.000
1.1.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	168.752.700
1.1.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	888.070.000
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp	110.437.700
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	194.677.600
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	5.845.000
1.2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rp	85.588.000
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.3.1	Pengadaan Mebel	Rp	522.860.000
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	429.350.000
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	124.622.000
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.224.799.500

	Jumlah	Rp	6.502.226.500
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	149.010.000
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	876.350.000
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1.251.197.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NIP. 198401132006042004

DEDDY HARIYANTO NIP. 197612262005011005

BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT



KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

DENGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NURIKHWAN, SE

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RUSDI HARTONO, S.Pi., MP.

Jabatan

: KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSD HARTONO, S.PI., MP.

NUR KHWAN, SE

NIP. 197808302005011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Luas Kawasan Ekosistem	Jumlah kawasan ekosistem pesisir kritis yang di rehabilitasi	27.84 Ha
Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%
		Persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya	100%

I. APBD

Program/Kegiatan		Anggaran
 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Rp	6.327.313.300,00
 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 	Rp	4.902.298.900,00
 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 	Rp	1.082.967.000,00
 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Rp	342.047.400,00
Jumlah	Rp	6.327.313.300,00

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

RUSDI/HARTONO, S.Pi., MP. NIP. 197204261997031005

NURIKHWAN, SE

NIP. 197808302005011010



KEPALA SEKSI KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

DENGAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SUPRIADI, S.Pi

Jabatan

: KEPALA SEKSI KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: NURIKHWAN, SE

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

NIP. 197808302005011010

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAM

SUPRIÁDI, S.Pi NIP. 196905112008011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	179.659,89 Ha
2.	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	32.9 Ha
3.	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen

APBD I.

Kegiatan / Sub Kegiatan/ Rincian		Anggaran
 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 1 di Luar Minyak dan Gas Bumi 	2 Mil Rp.	4.614.032.300,00
 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasari Penetapan dari Pemerintah Pusat 		1.198.975.200,00
 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir da Pulau Kecil 	n Pulau- Rp.	3.015.057.100,00
 Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun Mangrove di luar kawasan hutan 	Rp. dan	400.000.000,00
Jumlah	Rp.	4.614.032.300,00

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. ADHA RIZALDI, ST

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: NURIKHWAN, SE

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

ILIAK KEDITA

NURIKHWAN, SE

NIP. 197808302005011010

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA

M. ADHA RIZALDI, ST

NIP. 198010192010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi
2	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen
3	Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen

		KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.		pitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Iinyak dan Gas Bumi	Rp	1.082.967.000
	-	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Rp	100.000.000
	-	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Rp	756.000.000
	=	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Rp	226.967.000
		Jumlah	Rp	1.082.967.000

Banjarbaru, Januari 2025

NIP. 197808302005011010



KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: HUSNAWATY

Jabatan

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: NURIKHWAN

Jabatan

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA.

NUR KHWAN

NIP. 19780830 200501 1 010

HUSNAWATY

NIP. 19720118 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

NO.		KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	•	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	5 Kelompok
2	•	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok
3	-	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	50 Orang
4	-	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	105 orang

I. APBD

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	342.047.400,00
 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Rp.	232.884.000,00
 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 	Rp.	63.594.400,00
 Pelibatan Masyarakat dan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Rp.	45.569.000,00
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp.	288.266.600,00
 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Rp.	288.266.600,00
Jumlah	Rp.	630.314.000,00
	 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelibatan Masyarakat dan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Rp. Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Rp. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelibatan Masyarakat dan Penyusunan Rp. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Rp. Luar Minyak dan Gas Bumi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Rp. Kecil

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

HUSNAWATY

NIP. 19720118 199903 2 007

Juan/

NIP 19780830 200501 1 010

BIDANG PERIKANAN TANGKAP



KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

DENGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

Jabatan

: KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RUSDI HARTONO, S.Pi, M.P.

Jabatan

: KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

RUSDI HARTONO, S.Pi., M.P. NIP. 19720426 199703 1 005

Banjarbaru,

Januari 2025

PERTAMA

FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

NIP. 19760424 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	157.000 Ton
	-	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD) Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	64.000 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100

Kegiatan		Anggaran
 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd. 12 mil 	Rp	2.526.786.600
 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	Rp	1.110.737.000
 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT 	Rp	671.726.000
Jumlah	Rp	4.309.249.600

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSDI/HARTONO, S.Pi., M.P. NIP. 19720426 199703 1 005 FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

PIHAK PERTAMA

NIP. 19760424 199903 1 003



KEPALA SEKSI KENELAYANAN DENGAN

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. Hj. ANITA HAYATI

Jabatan

: KEPALA SEKSI KENELAYANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: H. FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

Jabatan

: KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

EAJAR PRAYO PRAMONO, A.Pi

NIP. 19760424 199903 1 003

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

Ir. Hj. ANVTA HAYATI NIP. 19790119 201406 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI KENELAYANAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	250 Dokumen
2.	Rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang diterbitkan	220 Rekomendasi
3.	Penyediaan data dan Informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan Informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	4 Dokumen

	Sub Kegiatan	A	Anggaran
1.	Penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT	Rp.	132.500.000
2.	Rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Rp.	337.090.000
3.	Penyediaan data dan Informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Rp.	202.136.000
	Jumlah	Rp.	671.726.000

PIHAK KEDUA,

H. FAJAR PKIYO PRAMONO, A.Pi NIP. 19760424 199903 1 003 Banjarbaru, Januari 2025 PIHAK PERTAMA,

Ir. Hj. AXITA HAYATI NIP. 19790119 201406 2 003



KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGKAPAN

DENGAN

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MUHAMMAD IKHWAN, A.PI., M.Pi

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PENANGKAPAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

Jabatan

: KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAR KEDUA

FAJAR PRIYO PRAMONO, A.PI

NIP. 19760424 199903 1 003

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA.

MUHAMMAD IKHWAN, A.PI., M.PI

NIP. 19740125 200701 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGKAPAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran
 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (di P. Laut) 	Rp	512.092.000
 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (di PUD) 	Rp	383.000.000
Jumlah	Rp	895.092.000

FAJAR PRIYO PRAMONO, A.Pi

NIP. 19760424 199903 1 003

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD IKHWAN, A.PI., M.Pi

NIP. 19740125 200701 1 012



KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN

DENGAN

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: YULIANDI SURYA, ST., MM.

Jabatan

: KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: FAJAR PRIYO PROMONO, A.Pi

Jabatan

: KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

HAK KEDUA

JAR PRIYO PROMONO, A.PI

NIP. 197604241999031003

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA.

YULIANDI SURYA, ST., MM. NIP. 197807062011011001

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET APBD
1.	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	13 Unit
2.	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit

Sub Kegiatan

Anggaran APBD-P

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp	2.014.694.600
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp	727.737.000
Jumlah	Rp	

PIHAK KEDUA

FAJAR PREYO PROMONO, A.PI

NIP. 197604241999031003

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMÁ,

YULIANDI SURYA, ST., MM.

NIP. 197807062011011001

BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN



KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

DENGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. H. KHAIRUDDIN, M.P.

Jabatan

: KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RUSDI HARTONO, S.Pi, M.P.

Jabatan

: KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSDI HARTONO, S.Pi., MP.

NIP. 19720426 199703 1 005

Ir. H. KHAIRODDIN, M.P

NIP. 19680909 199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Air Payau dan Laut	65.612,75 Ton
		Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Budidaya Air Tawar	121.852,25 Ton
2	Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	103,00
3	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	17 UPI

Program/Kegiatan	Anggaran						
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 	Rp	12.124.800					
 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 	Rp	1.051.129.700					
 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 	Rp	1.815.705.700					
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil							
Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp	1.973.833.500					
 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 	Rp	164.651.000					
Jumlah	Rp	5.017.444.700					

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSDI HARTONO, S.Pi, M.P NIP. 19720426 199703 1 005

Ir. H. KHAIRUDDIN, M.P. NIP. 19680909 199403 1 012

PIHAK PERTAMA,



KEPALA SEKSI BUDIDAYA PERIKANAN

DENGAN

KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: HASANUL BASRI, S.Pi

Jabatan

: KEPALA SEKSI BUDIDAYA PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Ir. H. KHAIRUDDIN, M.P.

Jabatan

: KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

<u>Ir. (I. KHAIRUDDIN, M.P.</u> NIP. 19680909 199403 1 012 <u>HASANUL BASRI, S.Pi</u> NIP. 19790516 200801 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI BUDIDAYA PERIKANAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi
2	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen
4	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	220 Orang

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran
 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 	Rp	12.124.800
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 	Rp	78.416.500
 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 	Rp	103.946.300
 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 	Rp	596.551.400
Jumlah	Rp	791.039.000

<u>Ir. KHAJRUDDIN, M.P</u> NIP. 19680909 199403 1 012 ----

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

HASANUL BASRI, S.Pi NIP. 19790516 200801 1 019



KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

DENGAN

KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MARTIAH AKHDIANTI, S.Pi., M.P.

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Ir. H. KHAIRUDDIN, M.P.

Jabatan

: KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA.

<u>Ir. H. KMAÎRUDDIN, M.P</u> NIP. 19680909 199403 1 012 MARTIAH AKHDIANTI, S.Pi., M.P

NIP. 19790721 200801 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikpan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen
2	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan
2	Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Bagi Unit Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	8 Kegiatan

	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp	164.651.000
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
	 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 	Rp	1.599.139.000
	 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 	Rp	374.694.500
	Jumlah	Rp	2.138.484.500

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19680909 199403 1 012

MARTIAH AKHDIANTI, S.Pi., M.P NIP. 19790721 200801 2 019



KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

DENGAN

KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. Hj. MARLIANI

Jabatan

: KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Ir. H. KHAIRUDDIN, M.P.

Jabatan

: KEPALA BIDANG BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

Ir. H. KHAKUDDIN, M.P

NIP. 19680909 199403 1 012

Ir. Hj. MARLIANI

NIP. 19670225 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi	Persentase Cakupan Wilayah yang terkelola usaha pembudidayaan ikan di perairan darat	100%
	- Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi		100%
	- Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit

Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

Rp. 1.815.705.700

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Rp. 272.215.500

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan

di Laut

Jumlah

Rp. 2.087.921.200

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19680909 199403 1 012

Ir. Hj. MARLIANI NIP. 19670225 199303 2 006

BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: RUSDI HARTONO, S.Pi, M.P

Jabatan

: KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSDI HARTONO, S.PI., M.P.

NIP. 19720426 199703 1 005

D 1

MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S

PIHAK PERTAMA.

NIP. 19800611 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Kepatuhan pelaku usaha perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil	100%	
2	Kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	

Kegiatan		Anggaran
 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 	Rp	2.246.500.400,00
 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 	Rp	584.969.000,00
Jumlah	Rp	2.831.469.400,00

Banjarbaru, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RUSDI HARTONO, S.Pi, MP NIP. 19720426 199703 1 005

MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S.

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19800611 200604 1 004



KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DR. MUHAMMAD ZIA ULHAQ, SH. MH

Jabatan

: KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: MUHAMMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S.

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

MUHAMMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S

NIP. 19800611 200604 1 004

Banjarbaru, Januari 2025

PINAK PERTAMA,

DR. MUHAMMAD ZIA ULHAQ, SH. MH

MIP. 19840705 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINER JA	TARGET
1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai Kewenangan Provinsi	4 Pelaku Usaha
2	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai Kewenangan Provinsi	4 Pelaku Usaha
3	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai dengan Kewenangan Provinsi	4 Pelaku Usaha
4	Terlaksananya Pengawasan Usaha Penangkapan dan/usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya sesuai Kewenangannya Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai Kewenangannya Provinsi	2 Pelaku Usaha
5	Terlaksananya Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai Kewenangan Provinsi	2 Pelaku Usaha

Sub Kegiatan		Anggaran
 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi 	Rp	343.809.000
 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 	Rp	33.700.000
 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi 	Rp	25.000.000
 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi 	Rp	534.969.000
 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi 	Rp	25.000.000
Jumlah	Rp	962.478.000

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S NIP. 19800611 200604 1 004

DR. MUHAMMAD ZIA ULHAQ, SH. MH NIP. 19840705 200801 1 008

PIHAK PERTAMA,



KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM

DENGAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SINGGIH HONGGO SEPUTRO, A.Pi., M.Pi

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN

HUKUM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S.

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2025

MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S

PIHAK KEDU

NIP. 19800611 200604 1 004

SINGGIH HONGGO SEPUTRO, A.Pi., M.Pi.

NIP. 19730510 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dalam	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemanfaatan Ruang Laut sd. 12 mil	100%	
	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	berdaya kanan sd 12 Mil di Bidang Pembudidayaan Ikan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap	100%	
			100%	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	
		Jumah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan	300 Orang	
		Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran di Laut Yang Difasilitasi Proses Pemberkasan Perkaranya sd P.21	3 Kasus	

Sub Kegiatan

Anggaran

 Penanganan Perkara Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Izin Provinsi

Rp

662.478.000,00

Jumlah

Rp

662.478.000,00

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMAD RIZAL ANSHARIE, ST., M.S.

NIP. 19800611 200604 1 004

SINGGIH HONGGO SEPUTRO, A.Pi., M.Pi.

PHAK PERTAMA

NIP. 19730510 199803 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ALFI SYAHRIN, S.Pi, M.Pi

Jabatan

: KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: M. RIZAL ANSHARIE, ST, MS

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Δ

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA.

M. RIZAL ANSHARIE, ST, MS

NIP. 19800611 200604 1 004

ALFI SYAHRIN, S.Pi., M.Pi.

PIHAK PERTAMA.

NIP. 19740910 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi, Serah Terima dan	Identifikasi dan Verifikasi bantuan Papan Seruan untuk POKMASWAS	12 Kelompok
	Monitoring dan Evaluasi Papan Seruan untuk POKMASWAS	Serah Terima bantuan Papan Seruan untuk POKMASWAS	12 Kelompok
		Monitoring dan Evaluasi bantuan Papan Seruan untuk POKMASWAS	11 Kelompok
2	Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi, Survey Harga, Serah Terima dan Monitoring dan Evaluasi	Identifikasi dan Verifikasi Hibah bantuan Perahu Motor untuk POKMASWAS	8 Kelompok
	Hibah Perahu Motor untuk POKMASWAS	Survey Harga Perahu Motor	1 Kabupaten
		Serah Terima Hibah bantuan Perahu Motor untuk POKMASWAS	8 Kelompok
		Monitoring dan Evaluasi Hibah bantuan Perahu Motor untuk POKMASWAS	5 Kelompok
3	Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi, Serah Terima dan	Identifikasi dan Verifikasi bantuan Perlengkapan Pokmaswas	11 Kelompok
	Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Pokmaswas untuk	Serah Terima bantuan Perlengkapan Pokmaswas	11 Kelompok
	POKMASWAS	Monitoring dan Evaluasi bantuan Perlengkapan Pokmaswas	11 Kelompok

12020	ETTTY TO LED DAY	a second or second		own realist
Vani	atan	/Ch	Kegia	tan
Neu	alan	Joub	Reula	llall

Anggaran

 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Rp

1.206.513.400

Jumlah

Rp

1.206.513.400

Banjarbaru,

Januari 2025

PIHAK KEDUA,

M. RIZAL ANSHARIE, ST, MS

NIP. 19800611 200604 1 004

ALFI SYAHRIN, S.Pi., M.Pi.

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19740\$10 200604 1 015